



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018

## SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ANDRES

NIM : 11627103832

JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018" yang ditulis oleh:

Nama : ANDRES  
NIM : 11627103832  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2020  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. H. Magfirah, MA

Sekretaris  
Ioni Alizon, SH., MH

Penguji I  
Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II  
Mhd. Kastulani, SH., MH

*(Signatures of the Exam Panel Members)*

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul " *Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara* " berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 "

Nama : ANDRES  
 NIM : 11627103832  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Pembimbing Skripsi

**FIRDAUS, S.H., M.H.**  
 NIP: 19661002199403 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andres  
 NIM : 11627103832  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sawah, 03 Nopember 1996.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018"** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Maret 2020  
 Yang membuat pernyataan



**ANDRES**

NIM. 11627103832





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengangkatan menjadi anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dalam pengangkatan menjadi anggota KPPS tidak berjalan dengan lancar, dimana ada beberapa peserta yang bisa menjadi anggota KPPS padahal sudah pernah menjabat lebih dari 2 (dua) kali periode, lulus tanpa ikut seleksi, banyaknya keluhan dari peserta mengenai soal-soal dalam ujian seleksi terlalu sulit, dan sarana dan prasarana dalam seleksi pengangkatan anggota KPPS kurang memadai.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, serta kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong ke dalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, dimana penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian ini pada Ketua KPU Kabupaten Kampar, Eks PPK, Eks PPS, Eks KPPS, dan Tokoh Masyarakat Desa Sawah, kemudian populasi dalam penelitian ini yaitu 1 orang Ketua KPU Kabupaten Kampar sekaligus sampel, 5 orang Eks PPK dengan sampel 1 orang, 3 orang Eks PPS sekaligus sampel, 70 Eks KPPS dengan sampel 35 orang, 4 orang Tokoh Masyarakat Desa Sawah sekaligus sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme pengangkatan anggota KPPS di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 kurang berjalan dengan baik, dikarenakan PPS Desa Sawah kurang mampu memahami wewenangnya sebagai panitia dalam mekanisme pengangkatan anggota KPPS dimana PPS Desa Sawah kurang mampu memahami strategi menyebarkan informasi pendaftaran, membiarkan beberapa masyarakat mengikuti pengangkatan anggota KPPS yang sudah pernah menjabat menjadi anggota KPPS lebih dari 2 (dua) kali periode, memberikan soal-soal yang sulit pada saat test ujian tertulis, dan PPS Desa Sawah meluluskan beberapa peserta yang tidak mengikuti test ujian tertulis dan test wawancara. Kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota KPPS di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 yaitu kurangnya pemahaman PPS dalam pengangkatan anggota KPPS, kurangnya kesadaran hukum PPS, kurangnya pengawasan dari PPK, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam pengangkatan anggota KPPS.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat limpahan rahmad dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018”**. Shalawat beriringan salam buat junjungan alam yakni baginda MUHAMMAD SAW yang selalu menjadi contoh teladan yang baik dalam segala tingkah laku yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi ALLAH SWT.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis berhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Mustapa dan Ibunda Hartianis (Almh) yang tiada hentinya mendukung dan memotivasi serta mendoakan penulis selama ini. Teruntuk Ibunda tersayang semoga ALLAH SWT mengampuni semua salah dan dosa serta semoga beliau diletakkan di sisi terbaik-Nya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Kastulani, S.H.,M.H selaku dosen Penasehat Akademik penulis yang memberikan motivasi, masukan, dan nasehat selama perkuliahan.
  7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
  8. Kepada kakak laki-laki penulis Ian Harpadeles, S.E dan Dodi Rinaldi, A.Md dan adik perempuan penulis Jessy Milianty yang setia menjaga penulis serta mengingatkan atas setiap kesalahan yang penulis lakukan.
  9. Kakek, Nenek, Paman, Tante, dan saudara-saudara penulis lainnya yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program sarjana ini.
  10. Bapak dan Ibu di Kejaksaan Negeri Kampar tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang sudah memberikan semangat dan arahan kepada penulis.
  11. Bapak, Ibu, Masyarakat, serta teman-teman KKN UNRI, UIN, dan STIE Syariah Bengkalis yang sama-sama KKN di Desa Sukajadi.
  12. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga ALLAH SWT membalas budi dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Penulis

**ANDRES**  
11627103832

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	16

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara .....	18
1. Sejarah Desa Sawah .....	18
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sawah .....	21
3. Agama .....	22
4. Sarana dan Prasarana Desa Sawah .....	23
B. Gambaran Umum Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara .....	25

### BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum di Indonesia .....	27
1. Pemilihan Umum Orde Lama .....	29
2. Pemilihan Umum Orde Baru .....	31
3. Pemilihan Umum Era Reformasi .....	38
B. Tinjauan Umum tentang Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara .....	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 .....	51
B. Kendala dalam Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 .....	73

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1:	Populasi dan Sampel .....	13
Tabel II. 2:	Jumlah Penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara .....	22
Tabel II. 3:	Rumah Ibadah di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara .....	23
Tabel II. 4:	Sarana Pendidikan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara ...	24
Tabel IV. 5:	Menjadi Tim Kompanye Peserta Pemilihan Umum 2019 .....	57
Tabel IV. 6:	Sudah Pernah Menjabat 2 (dua) Kali Periode Menjadi Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara .....	58
Tabel IV. 7:	Sudah Melengkapi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Tahun 2019 .....	60
Tabel IV. 8:	Hasil Kelulusan Berdasarkan Pendidikan Calon Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Tahun 2019 ....	60
Tabel IV. 9:	Mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Calon Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Tahun 2019 .....	63
Tabel IV. 10:	Mengalami Kesulitan dalam Menjawab Pertanyaan Seleksi Ujian Tertulis .....	64
Tabel IV. 11:	Hasil Kelulusan Ujian Tertulis Berdasarkan Pendidikan Calon Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Tahun 2019 .....	65
Tabel IV. 12:	Mengikuti Seleksi Test Wawancara Calon Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Tahun 2019 .....	67
Tabel IV. 13:	Hasil Kelulusan Seleksi Terbuka Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Tahun 2019 .....	69
Tabel IV. 14:	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Seleksi Terbuka dalam Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Tahun 2019 .....	80



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pada bulan Mei 1998 membawa berbagai perubahan mendasar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum tersebut menuntut berbagai agenda yang harus dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kehidupan bernegara selama 32 tahun sebelumnya yang berjalan di bawah bayang-bayang kediktatoran rezim Orde Baru. Salah satu dari 6 agenda reformasi yang diusung ketika itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>1</sup>

Dalam UUD 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Grotius mengatakan kekuasaan tertinggi untuk memerintah ini dinamakan kedaulatan. Kedaulatan dioleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan orang lain, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia. Lebih lanjut Jean Bodin dalam buku *Les Six Lives de la Republique* mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang mengatasi warga negara dan anak buah, malahan mengatasi undang-undang, atau dengan kalimat lain, dikatakan Bodin bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng kepunyaan satu

<sup>1</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2012), Cet. Ke-2, h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Republik.<sup>2</sup> Kedaulatan rakyat juga diagungkan dengan istilah “demokrasi” (*demos* rakyat dan *cratein* = kekuasaan).<sup>3</sup>

Secara harfiah “Demokrasi” dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat karena pada hakekatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.<sup>4</sup>

Menurut Alamudi demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang yang sering berliku-liku sehingga demokrasi disebut suatu pelebagaan dari kebebasan. Nilai terpenting lain dari demokrasi adalah persamaan. Hemat kata, soko guru demokrasi adalah persamaan dan kebebasan.<sup>5</sup>

Demokrasi merupakan suatu istilah yang sangat di agungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal. Bahkan, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.<sup>6</sup> Demokrasi digadang-gadang sebagai impian setiap warga negara agar dari demokrasi dilahirkan sosok manusia yang memenuhi keinginan rakyatnya.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>4</sup> Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 7.

<sup>5</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2012), h. 39.

<sup>6</sup> Hendra Nurjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 memberikan harapan baru dalam tatanan politik dan sistem politik di Indonesia, diantaranya adalah adanya perubahan dalam menegakkan demokrasi yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dimana sebelumnya pada masa orde lama dan orde baru merupakan hal yang asing, namun akhirnya diakui oleh dunia Internasional sebagai suatu negara yang telah menjalankan proses demokrasi dengan baik.

Pemilihan Umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu, seperti memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan secara langsung, adil, jujur, damai, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan pelaku pilih. Sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi diparlemen atau pejabat publik.<sup>7</sup>

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan Pemilu dalam upaya mewujudkan Pemilu sebagai

<sup>7</sup> Khairul Fahmi, *op.cit.*, h. 52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.<sup>8</sup> Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional dan independen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa:<sup>9</sup>

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS; dan
- h. KPPSLN.

Berdasarkan Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa KPU bertugas menyusun tata kerja, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Termasuk salah satunya KPU Kampar. KPU Kampar merupakan salah satu Komisi Pemilihan Umum yang berada di salah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar.

Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang beranggotakan 7 orang yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. KPPS dipilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai peraturan yang berlaku atas nama KPU Kabupaten/Kota. Dalam pengangkatan anggota KPPS perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tingkat

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 221.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi. KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemilihan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam langkah mewujudkan kedaulatan pemilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih dalam memberikan hak pilihnya.

Mengenai persyaratan untuk menjadi anggota KPPS telah dicantumkan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun ada peraturan tambahan yaitu Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengenai persyaratan menjadi anggota yaitu menyatakan bahwa “tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya”.<sup>10</sup>

Kecamatan Kampar Utara merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Kampar, seiring otonomi daerah maka dimekarkan menjadi Kecamatan Kampar Utara. Kecamatan Kampar Utara memiliki 8 (delapan) desa yaitu antara lain: Desa

<sup>10</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat (1) poin e1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sawah, Sungai Jalau, Sungai Tonang, Muara Jalai, Kampung Panjang, Naga Beralih, Sendayan, dan Kayu Aro.

Desa Sawah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Utara sekaligus Ibu Kota nya Kecamatan, Desa Sawah memiliki 4 (empat) dusun yaitu antara lain: Dusun Sawah, Dusun Tanjung, Dusun Sangkar Puyuh, dan Dusun Pulau Tengah. Masyarakat Desa Sawah sangat mengapresiasi Pemilu apalagi Pemilu tahun sekarang, hal itu terbukti banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dengan cara mencalonkan diri menjadi anggota KPPS. Kesuksesan akan penyelenggaraan merupakan suatu harapan masyarakat Desa Sawah untuk mewujudkan demokrasi yang adil, jujur, damai, dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatakan bahwa “ Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS”.<sup>11</sup>

Dari pengamatan yang penulis lakukan, di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara terdapat beberapa masyarakat yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode menjadi anggota KPPS, hal tersebut sudah jelas melanggar ketentuan dalam persyaratan menjadi anggota KPPS yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

<sup>11</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat (1) poin k.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 55 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatakan bahwa “ PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS”.

Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dalam pengangkatan anggota KPPS tidak berjalan lancar sebagaimana ditentukan oleh peraturan KPU tersebut, dimana adanya masyarakat yang bisa menjadi anggota KPPS tanpa ikut test atau seleksi bersama, ada juga menurut masyarakat setempat mengatakan bahwa ada yang bisa masuk dan mengikuti test atau seleksi bersama sebagai formalitasnya saja, ada beberapa masyarakat Desa Sawah yang ikut dalam seleksi pengangkatan anggota KPPS yang mengeluh saat mengikuti seleksi terbuka karna merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh PPS Desa Sawah yang menurut mereka diluar dari ketentuan yang seharusnya, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam seleksi terbuka pengangkatan anggota KPPS, sehingga mengakibatkan pengangkatan anggota KPPS di Desa Sawah kurang kondusif atau kurang berjalan dengan lancar karena fasilitas yang disediakan oleh PPS kurang memadai.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai pengangkatan anggota KPPS yang terjadi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pengangkatan anggota KPPS tersebut yaitu dengan Judul:

## MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018.

### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun dengan sistematis, dan terarah, maka penulis memberikan batasan yaitu mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, mulai dari pengumuman pendaftaran sampai pengumuman hasil seleksi calon anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, dan kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018?
2. Apakah Kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Kecamatan Kampar Utara serta kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Adapun secara detail mengenai kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Diharapkan juga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis, dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian dapat memberikan masukan dan sumber informasi bagi Pemerintah, Lembaga yang terkait, dan Masyarakat. Memberikan referensi dan informasi bagi para pengambil kebijakan supaya dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.

## E. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka metode penelitian ini dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan<sup>12</sup>. Maksudnya penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti mengenai mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-12, h. 14.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>13</sup> Penulis melakukan analisis terhadap peristiwa yang terjadi mengenai mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara karna di Dasa Sawah Kecamatan Kampar Utara dalam mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum. Seperti pelanggaran dalam persyaratan menjadi anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, tidak mengikuti seleksi terbuka, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam seleksi terbuka pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>14</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah

<sup>13</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 60.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), Cet. Ke-7, h. 118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kampar berjumlah 1 orang.
- b) Eks Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kampar Utara Tahun 2019 berjumlah 5 orang.
- c) Eks Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sawah Tahun 2019 berjumlah 3 orang.
- d) Eks Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Desa Sawah Tahun 2019 berjumlah 70 orang.
- e) Tokoh masyarakat berjumlah 4 orang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

- a) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kampar berjumlah 1 orang.
- b) Eks Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kampar Utara Tahun 2019 berjumlah 1 orang.
- c) Eks Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sawah Tahun 2019 berjumlah 3 orang.
- d) Eks Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Desa Sawah Tahun 2019 berjumlah 35 orang.

<sup>15</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 204.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Tokoh masyarakat berjumlah 4 orang.

Metode Pengambilan sampel merupakan suatu proses penentuan atau pemilihan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subyek atau obyek dalam penelitian.<sup>16</sup> Penulis melakukan metode pengambilan sampel beragam, yaitu total sampling merupakan metode pengambilan sampel sama dengan populasi, purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, dan random sampling merupakan metode pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan tingkatan dalam populasi.

**Tabel I. 1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Ket
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kampar	1	1	100%	Total Sampling
2.	Eks Panitia Pemilihan Kecamatan Kampar Utara Tahun 2019	5	1	20%	Purposive Sampling
3.	Eks Panitia Pemungutan Suara Desa Sawah Tahun 2019	3	3	100%	Total Sampling
4.	Eks Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Desa Sawah Tahun 2019	70	35	50%	Random Sampling
5.	Tokoh Masyarakat	4	4	100%	Total Sampling

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

<sup>16</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *op.cit.*, h. 252.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>17</sup>

## b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

## a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian.<sup>19</sup> Seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang diperoleh melalui kajian pustaka meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-6, h.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 146.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Pengumpul Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

- a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung bagaimana mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>21</sup> Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terbuka, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atau daftar pertanyaan tersebut.<sup>22</sup> Di sini penulis memberikan angket kepada eks anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2017), Cet. Ke-36, h. 186.

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data tulisan, baik itu dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

**F. Sistematika Penelitian**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang Sejarah Desa Sawah, Kondisi Geografis dan Demografi Desa Sawah, Agama, Sarana dan Prasarana Desa Sawah, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini berisi tentang Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum di Indonesia, Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, Era Reformasi, dan Tinjauan Umum tentang Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, Tugas, Wewenang, Persyaratan, dan Tahapan Pengangkatan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai Mekanisme

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pengumutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dan Kendala dalam Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pengumutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

##### 1. Sejarah Desa Sawah

Desa Sawah merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau Indonesia, sekaligus Ibukotanya Kecamatan Kampar Utara. Sejarah lahirnya Desa Sawah menurut beberapa Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Desa Sawah, yaitu berasal dari nama seorang wanita yang bernama Sowa, Mak Sowa berasal dari Tanjung Berulak (bertepatan di seberang sungai Desa Sawah sekarang). Konon dulunya, Mak Sowa ini memiliki Perkebunan dan Pertanian yang sangat luas di Desa Sawah, setiap hari Mak Sowa pergi ke perkebunan dan pertaniannya untuk bercocok tanam.<sup>23</sup>

Ketekunan yang selalu diterapkan oleh Mak Sowa mampu menghasilkan padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang sangat banyak, sehingga masyarakat setempat selalu berkunjung. Singkat cerita orang-orang yang berkunjung ke wilayah tersebut menanamkan wilayah Sowa. Dulunya wilayah ini dikenal dengan Dusun yang memiliki persawahan yang sangat banyak. Dusun ini terletak di tengah-tengah dusun lainnya, oleh karena itu semua masyarakat dusun sepakat memberikan nama pada wilayah tersebut menjadi sebuah nama desa yaitu Desa Sawah. Desa Sawah terdiri dari 7 (tujuh) dusun, antara lain:

1. Dusun Sawah;
2. Dusun Tanjung;

<sup>23</sup> Data diperoleh dari Profil Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dusun Pulau Tengah;
4. Dusun Sangkar Puyuh;
5. Dusun Balai Jering;
6. Dusun Santul;
7. Dusun Ujung Padang.

Terbentuknya Desa Sawah berawal dari program pemekaran dari kenegerian Airtiris yaitu pada tahun 1973 yang pemerintahannya dipimpin oleh Wali Negeri. Setelah pemekaran Desa Sawah dipimpin oleh Wali Muda yang bernama Bapak M. Nasir, pada tahun 1973. Habisnya masa pemerintahan, dilanjutkan oleh Wali Desa yaitu bernama Bapak Muzbar dengan masa jabatan dari tahun 1990 s/d 1998. Kemudian pemerintahan desa di pimpin oleh Pjs Wali Desa yaitu Ibu Maharani. Tahun 1999 adalah awal mulanya pemilihan Kepala Desa pertama dan dimenangkan oleh Bapak Syukri dengan masa jabatan 1999 s/d 2005. Pada akhir masa jabatan Bapak Syukri, Desa Sawah mengalami pemekaran mengingat bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perkembangan zaman, maka Desa Sawah dipecah menjadi dua desa yaitu Desa Sawah dan Desa Sungai Jalau.<sup>24</sup>

Desa Sawah terdiri dari 4 (empat) dusun, antara lain:

1. Dusun Sawah;
2. Dusun Tanjung;
3. Dusun Sangkar Puyuh;
4. Dusun Pulau Tengah.

<sup>24</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sungai Jalau terdiri dari 3 (tiga) dusun, antara lain:

1. Dusun Santul;
2. Dusun Ujung Padang;
3. Dusun Balai Jering.

Habisnya masa pemerintahan Bapak Syukri, dilanjutkan dengan pemilihan secara langsung dengan diikuti oleh 2 (dua) calon Kepala Desa, saat itu dimenangkan oleh Bapak Khairul. Setelah habisnya masa jabatan Bapak Khairul, pemerintahan Desa Sawah dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pjs Kepala Desa yang bernama Nur Hidayat. Pada akhir tahun 2014 diadakan pemilihan dengan diikuti oleh 3 (tiga) calon Kepala Desa dan dimenangkan oleh Bapak Supardi, masa jabatan beliau masih berlanjut sampai sekarang.

Diantara Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Sawah adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Tahun (1973-1989) M. Nasir; (Wali Muda)
2. Tahun (1973-1989) H. Muzbar;
3. Tahun (1999-2005) Syukri;
4. Tahun (2005-2011) Khairul;
5. Tahun (2012-2013) Nurhidayat; (Pjs Kepala Desa)
6. Tahun (2014-2020) Supardi.

Itulah nama-nama yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

<sup>25</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Sawah

### a. Kondisi Geografis

Secara Geografis Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara memiliki Luas Wilayah 7.984 Ha yang terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun Sawah, Dusun Tanjung, Dusun Sangkar Puyuh, dan Dusun Pulau Tengah. Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berbatasan dengan 4 (empat) desa yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Sebelah Utara : Desa Kayu Aro;
- b) Sebelah Selatan : Desa Tanjung Berulak;
- c) Sebelah Barat : Desa Sungai Jalau;
- d) Sebelah Timur : Desa Naga Beralih.

Luas Wilayah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Pemukiman : ± 140 Ha
- b) Petanian Sawah : ± 180 Ha
- c) Ladang/Tegalan : ± 130 Ha
- d) Hutan : ± 3100 Ha
- e) Rawa-rawa : ± 10 Ha
- f) Perkantoran : ± 9 Ha
- g) Sekolah : ± 6 Ha
- h) Jalan : ± 20 Ha
- i) Lapangan Sepak Bola : ± 2 Ha

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Kondisi Demografi

Secara Demografi Desa Sawah merupakan masyarakat homogen dengan identitas agama dan kebudayaan yang sama tanpa adanya campuran dari ras, etnis, dan agama yang lain. Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa Sawah 2019, jumlah penduduk Desa Sawah berjumlah secara keseluruhan 3.260 jiwa yang terdiri dari 1.625 laki-laki dan 1.635 perempuan.<sup>28</sup> Perhatikan tabel dibawah ini:

**Tabel. II. 2**  
**Jumlah Penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara**

No	Penduduk Desa Sawah	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.625	49,85%
2.	Perempuan	1.635	50,15%
<b>Jumlah</b>		<b>3.260</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keseluruhan penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara yaitu 3.260 jiwa, dan dapat diketahui bahwa 1.635 atau 50.15% jiwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki yaitu 1.621 atau 49,85% .

## 3. Agama

Agama merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam mengatur tata keimanan dan peribadatan serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan. UUD 1945 sudah mengatur tentang agama dan seluruh rakyat diberikan kebebasan dalam memeluk

<sup>28</sup> Ibid.

agamanya masing-masing dan juga diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan itu. Masyarakat Desa Sawah semuanya menganut Agama Islam tidak ada satu pun agama lain yang dianut, karena penduduk Desa Sawah adalah masyarakat homogen yang merupakan masyarakat dengan identitas agama yang sama berdasarkan keturunan.

#### 4. Sarana dan Prasarana Desa Sawah

##### a. Sarana Rumah Ibadah

Rumah Ibadah merupakan tempat yang digunakan oleh umat yang beragama untuk melaksanakan ibadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Penduduk Desa Sawah semuanya menganut Agama Islam tanpa ada campuran dari agama lain. Desa Sawah memiliki beberapa rumah ibadah antara lain seperti Mesjid, Mushallah/Surau yang terdapat pada beberapa dusun di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Perhtikan tabel di bawah ini:

**Tabel. II. 3**  
**Rumah Ibadah di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara**

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah	Persentase
1.	Mesjid	5	38,46%
2.	Mushallah/Surau	7	53,85%
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data dari Kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keseluruhan Rumah Ibadah di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara yaitu 13 Rumah Ibadah yang terdiri dari 5 Mesjid dan 7 Mushallah/Surau dan dapat diketahui bahwa di Desa Sawah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Ibadah yang banyak yaitu 7 Mushallah/Surau dengan persentase 53,85% kemudian 5 Mesjid dengan persentase 38,46%.

### b. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan dalam masyarakat pedesaan sangatlah penting diperhatikan karena majunya suatu daerah dapat dilihat dari kesediaan sarana pendidikan. Sarana Pendidikan Desa Sawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. II. 4**  
**Sarana Pendidikan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	TK	1	7,69%
2.	SD/MI	3	23,08%
3.	SLTP/SMP	1	7,69%
4.	SLTA/SMA	0	0%
5.	MDA	3	23,08%
6.	TPQ	5	38,46%
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas, sarana pendidikan Desa Sawah secara keseluruhan berjumlah 13 bangunan, sarana pendidikan yang paling banyak yaitu TPQ dengan jumlah 5 bangunan, MDA berjumlah 3 bangunan, dan SMP berjumlah 1 bangunan, sedangkan sarana pendidikan tingkat SMA berjumlah 0 bangunan. Dengan kata lain, sarana pendidikan yang ada di Desa Sawah cukup memadai meskipun belum sepenuhnya yaitu belum adanya bangunan untuk tingkat SMA.

## B. Gambaran Umum Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Desa Sawah pada tahun 2019 terdapat 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) diberbagai dusun, antara lain yaitu Dusun Sawah terdapat 4 (empat) TPS, Dusun Tanjung terdapat 4 (empat) TPS, Dusun Pulau Tengah terdapat 1 (satu) TPS, dan Dusun Sangkar Puyuh terdapat 1 (satu) TPS.

Setiap TPS membutuhkan 7 (tujuh) Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). KPPS adalah penyelenggara pemilihan ditingkat Tempat Pemilihan Suara (TPS). KPPS dipilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Di Desa Sawah terdapat 3 (tiga) PPS dan dibantu oleh 3 (tiga) Sekretariat PPS dengan rincian sebagai berikut:<sup>29</sup>

### PPS Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

1. M. Yulis (Sebagai Ketua)
2. Dahrizul (Sebagai Anggota)
3. Mitriadi (Sebagai Anggota)

### Sekretariat PPS Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

1. Suherdi (Sebagai Ketua)
2. Rosnida (Sebagai Anggota)
3. Fitri Yati (Sebagai Anggota)

PPS Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara mengangkat 70 (tujuh puluh) anggota KPPS yang ditempatkan ke TPS sesuai alamat anggota KPPS dengan

<sup>29</sup> Wawancara dengan M. Yulis, Eks PPS Tahun 2019 Desa Sawah, pada tanggal 18 Oktober 2019 (Jam 09.20).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rincian TPS 1 yang beralamat di Dusun Sawah dimana ada 6 (enam) anggota laki-laki dan 1 (satu) anggota perempuan, TPS 2 juga beralamat di Dusun Sawah dimana ada 5 (lima) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota perempuan, TPS 3 beralamat di Dusun Sangkar Puyuh dimana ada 5 (lima) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota perempuan, TPS 4 beralamat di Dusun Tanjung dimana ada 3 (tiga) anggota laki-laki dan 4 (empat) anggota perempuan, TPS 5 juga beralamat di Dusun Tanjung dimana ada 5 (lima) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota perempuan, TPS 6 beralamat di Dusun Pulau Tengah dimana semua anggotanya laki-laki, TPS 7 beralamat di Dusun Sawah dimana ada 5 (lima) anggota laki-laki dan 2 (anggota) perempuan, TPS 8 juga beralamat di Dusun Sawah dimana ada 4 (empat) anggota laki-laki dan 3 (tiga) anggota perempuan, TPS 9 beralamat di Dusun Tanjung dimana ada 4 (empat) anggota laki-laki dan 3 (tiga) anggota perempuan, TPS 10 juga beralamat di Dusun Tanjung dimana ada 3 (tiga) anggota laki-laki dan 4 (empat) anggota perempuan. Jadi, itulah jumlah total dari anggota KPPS Desa Sawah yang mengikuti pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>30</sup>

Pemilihan Umum diakui secara global oleh sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpetrian), pemilu merupakan sebuah arena mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Demokrasi juga mengharuskan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa (*ruling party*).<sup>31</sup>

Ibnu Tricahyo mendefinisikan pemilu dari sudut pandang yang lebih abstrak dengan melihat pemilu tidak hanya sekedar teknis, melainkan ada nilai filosofisnya. Ibnu juga mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1).

<sup>31</sup> Daud M. Liando, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Study Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016, h. 16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

absah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam konteks sistem demokrasi, apa yang dikatakan Ibnu cukup membenarkan apa yang dikatakan Lances Castles bahwa pemilu merupakan sarana yang tak terpisahkan dalam kehidupan politik negara demokrasi modern. Dimana dalam sistem politik demokrasi modern, pemilu merupakan sebuah keharusan. Ben Reilly sebagaimana dikutip Joko J. Prihatmoko mengatakan, pada intinya sistem pemilihan dirancang untuk memenuhi tiga hal, dimana ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>32</sup>

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (mencakup pemilu kepala daerah), Undang-undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Khairul Fahmi, *op.cit.*, h.53.

<sup>33</sup> Farahdhiba Rahma Bactiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*, Jurnal Politik Profetik, Vol. 3 No. 1, 2014.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penulis akan memaparkan secara singkat bagaimana Pemilu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.

### 1. Pemilihan Umum Orde Lama

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia.

Sebelum pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia telah melaksanakan pemilu yang bersifat lokal sejak masih berada dibawah kekuasaan Negeri Belanda yakni:<sup>34</sup>

- a. Akhir Tahun 1940-an, Pemilu di bawah Kekuasaan Negeri Belanda.
- b. Tahun 1948 Pemilu di Wilayah Yogyakarta, dalam pemilu di Yogyakarta memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Pemilih memilih 7.628 elektor yang bertemu lima pekan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.
- c. Pemilu 1951, Pemilu di Daerah Minahasa dan Sangihe Talaud. Misal, dalam pemilihan di Minahasa, memilih secara langsung 25 anggota DPRD.
- d. Tahun 1961, Pemilu di Wilayah Papua (pada saat itu masih di bawah kekuasaan Negeri Belanda).

Pemilu di tingkat yang lebih lokal di luar pemilu-pemilu di atas, setiap tahun dilaksanakan puluhan ribu pemilihan untuk posisi publik terutama Kepala Desa. Contoh lain termasuk pemilihan untuk posisi Kepala Negeri dari masyarakat di daerah Sumatera Barat pada Juni dan Juli 1946.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2

<sup>35</sup> *Ibid.*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemilu 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Ketika itu Republik Indonesia baru berusia 10 tahun. Jika dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah sebelum melaksanakan pemilu di usianya yang ke-10 Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara demokratis? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini.<sup>36</sup>

Mengenai Pemilu 1955, sebelumnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Moh. Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu tercantumkan dari Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang anjuran pembentukan partai-partai politik, dikeluarkan atas desakan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNP).<sup>37</sup>

Dalam Pemilu 1955 menerapkan sistem pemilu proporsional yang dikaitkan dengan sistem daftar terbuka. Pada sistem ini, kontestan akan mendapatkan kursi berdasarkan perolehan suara dalam pemilu. Daftar terbuka menjadi pemilih dapat menuliskan nama calon dari daftar calon yang disusun kontestan. Pada waktu itu sistem itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Belanda, merupakan satu-satunya sistem pemilu yang dikenal dan dimengerti oleh para pemimpin negara.

Pada pemilu 1955 ini, pemilihan ditujukan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Jumlah peserta pemilu anggota DPR ini sebanyak 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan.

<sup>36</sup> Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif, Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), h. 42.

<sup>37</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan peserta untuk pemilu anggota Konstituante adalah sebanyak 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan.<sup>38</sup> Sementara ketentuan lainnya, bagi calon perorangan atau melalui kumpulan dapat mengemukakan calon untuk satu dapil dengan mendapat dukungan minimal 200 orang pemilih. Selanjutnya calon daftar kumpulan harus mendapat dukungan paling sedikit 25 orang pemilih untuk tiap-tiap calon.<sup>39</sup>

Pemilu pertama dilakukan pada tanggal 29 September 1955, yang bertujuan untuk memilih anggota DPR. Pemilu kedua, dihelat pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota konstituante.<sup>40</sup> Pemilu 1955 tersebut adalah Pemilu pertama yang berlangsung dalam suasana kemerdekaan. Pemilu ini berlangsung sangat demokratis; tidak ada pembatasan partai-partai, dan administrasi teknis berjalan lancar dan jujur. Pemilu ini dipandang sebagai prestasi gemilang, afirmasi kebangsaan dan jawaban nyata kepada kaum skeptik di dalam dan di luar negeri yang mengklaim Bangsa Indonesia tidak sanggup berdemokrasi. Bahkan, Irene Tinker dan Mil Waker tentang Pemilu 1955 dengan kata-kata, *“Indonesia berani mempertaruhkan seluruh proses pemilihan umum pada kecakapan penduduk desa yang buta huruf dan...taruhan itu dimenangkannya”*.<sup>41</sup>

## 2. Pemilihan Umum Orde Baru

Ketika Orba berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 (enam) kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Meskipun

<sup>38</sup> Muhadam Labolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perseda, 2017), Cet. Ke-2, h. 115.

<sup>39</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 9-10.

<sup>40</sup> Gunawan Suswantoro, *loc.cit.*

<sup>41</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 15-16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

demikian, pelaksanaan pemilu dibawah Orba memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu yang dikenal negara-negara demokrasi pada umumnya. Jika di Negara demokrasi karakter pemilu dibangun di atas prinsip free and fair baik dalam struktur dan proses pemilu, sebaiknya, Orba justru menghindari penerapan prinsip tersebut. Yang terjadi kemudian adalah ketidakseimbangan kontestasi antar peserta pemilu dan hasil pemilu diatur melalui cara-cara tertentu untuk kalangngan kekuasaan Orba itu sendiri.<sup>42</sup>

Pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis tersebut, bahkan tanpa alasan. Orba menginginkan adanya pemenang tunggal yang menyokong segala kebijakan yang mereka buat. Hal ini berangkat dari pengalaman demokrasi liberal, pluralitas kekuatan politik menjadi pemerintah tidak dapat berjalan efektif. Paradigma Orba “ekonomi sebagai panglima” atau juga dikenal dengan ideologi pembangunanisme menuntut stabilitas politik, yang dalam rancang bangun Orba, hanya bisa dilakukan apabila ada kekuatan penting. Dengan demikian, Pemilu bagi Orba adalah bukan merupakan suatu alat atau sarana untuk mengubah pemerintah atau negara RI; dan keterlibatan masyarakat di dalam pemilu lebih merupakan kewajiban ketimbang hak warganya. Untuk memahaminya akan dijelaskan berikut ini:

#### 1) Pemilu 1971

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS RI) menjadi Pejabat Presiden untuk menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa (SI) MPRS 1967, ia tidak

<sup>42</sup> *Ibid.*, h, 16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secepatnya menyelenggarakan pemilu demi mencari letigimasi kekuasaan di masa transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar pemilu dapat diselenggarakan di tahun 1968 kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967. Jenderal Soeharto menghendaki agar pemilu baru akan diselenggarakan di tahun 1971. Sebagai Pejabat Presiden, Jenderal Soeharto tetap menghidupkan MPRS XI dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) bentukan Presiden Soekarno, hanya saja ia membersihkan terhadap orang-orang yang dianggap berbau Orde Lama dari lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut.<sup>43</sup>

Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR. Sistem pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada partai peserta pemilu.<sup>44</sup>

Di era Orba, kebijakan pengkerdilan peran dan penyederhanaan jumlah parpol menjadi agenda utama Pemerintahan Soeharto diawal Orba. Semangat awal berdirinya Orba untuk pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen seakan hanya menjadi slogan belaka. Langkah penyederhanaan sistem partai

<sup>43</sup> Gunawan Suswantoro, *op.cit.*, h. 45.

<sup>44</sup> Muhadam Labolo, *op.cit.*, h. 127-128.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunggal, yaitu menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik tunggal yang dominan.<sup>45</sup>

## 2) Pemilu 1977

Pasca Pemilu 1971, pelaksanaan pemilu secara periodik dan teratur mulai dilaksanakan di Orde Baru. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, yaitu tahun 1977. Setelah itu pemilu selalu dijadwalkan secara teratur, diselenggarakan sekali dalam 5 tahun.<sup>46</sup>

Pemilu 1977 diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilu yang memiliki struktur yang sama dengan penyelenggaraan pada tahun 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar negeri dibentuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang bersifat sementara (*ad hoc*).<sup>47</sup>

Dalam pemilu ini, pemerintah mendorong (memaksa) sembilan parpol untuk melakukan fusi (paksaan gabungan) yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dalam satu konsideran huruf b disebutkan, “bahwa dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar Partai-partai Politik dan Golkar benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan”.<sup>48</sup>

Saat itu UU No. 15/1969 tentang Pemilu diubah menjadi UU No. 4/1975 tentang Pemilu. Perubahan tersebut menegaskan bahwa yang berhak mengikuti

<sup>45</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 19.

<sup>46</sup> Gunawan Suswantoro, *op.cit.*, h. 47.

<sup>47</sup> Muhadam Lobolo, *op.cit.*, h. 131.

<sup>48</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemilu hanya dua parpol dan Golkar. Sistem Pemilu pada saat itu adalah sistem Proporsional.<sup>49</sup>

#### 3) Pemilu 1982

Pemilu 1982 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru.<sup>50</sup> Pemilu 1982 dilaksanakan pada 4 Mei 1982 untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 360 orang. Pemilu tahun 1982, landasan hukumnya adalah UU No. 2/1980 tentang Pemilu sebagaimana dalam UU sebelumnya, sistem pemilu yang digunakan yaitu dengan sistem pemilihan proporsional.<sup>51</sup>

Sistem dan tujuan yang dipakai sama dengan pemilu di tahun 1977. Pemilu ini adalah untuk memilih anggota DPR dengan komposisi yang sedikit berbeda. Hanya 364 anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Sementara 96 orang diangkat langsung oleh presiden. Pada pemilu kali ini, suara sah yang masuk tercatat sebanyak 75 juta suara lebih, dan lagi-lagi Golkar muncul sebagai pemenangnya.<sup>52</sup>

#### 4) Pemilu 1987

Pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Sistem pemilu yang digunakan pada tahun 1987 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam pemilu 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.<sup>53</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 27.

<sup>50</sup> Muhadam Labolo, *op.cit.*, h. 133.

<sup>51</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 28.

<sup>52</sup> Gunawan Suswantoro, *op.cit.*, h. 53.

<sup>53</sup> Muhadam Lobolo, *op.cit.*, h. 135.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu berikutnya dihelat tahun 1987, persisnya tanggal 23 April 1987. Sistem dan tujuan pemilihan yang ditetapkan di tahun pemilihan ini masih sama dengan pemilu yang sebelumnya, yaitu porposional dengan *varian party-list* untuk memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari jumlah tersebut, 400 orang dipilih secara langsung, dan 100 diangkat oleh Presiden Soeharto. Pada pemilu kali ini, tercatat lebih dari 93 juta pemilih ambil bagian. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 juta lebih suara (91,32%) suara dinyatakan sah.<sup>54</sup>

Pemilu tahun 1987 berlandaskan pada UU No. 1/1985 tentang Pemilu. Sistem Pemilu yang digunakan saat itu adalah sistem pemilihan proporsional. UU tersebut semakin memperkuat kedudukan kekuatan birokrasi sebagai penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu.

Dalam Pemilu tahun 1987, ditemukan fakta menarik, pimpinan Golkar dan Pimpinan PDI menandatangani penggabungan suara (*stembus accord*) untuk daerah-daerah Pemilihan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat Selatan, dan Maluku.<sup>55</sup>

#### 5) Pemilu 1992

Pemilu kelima di masa Orde Baru digelar pada 9 Juni 1992. Sistem dan tujuan pemilu ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali ini suara sah yang masuk mencapai 97 juta lebih suara, dari total pemilih terdaftar sebanyak 105.565.697 orang.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Gunawan Suswantoro, *loc.cit.*

<sup>55</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 28.

<sup>56</sup> Gunawan Suswantoro, *loc.cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemilu ini dilakukan dengan landasan hukum yang sama yaitu UU No. 1/1985 tentang Pemilu. Meskipun tidak ada perubahan UU, tetapi calon anggota DPR diperiksa secara khusus melalui Penelitian Khusus (Litsus). Mekanisme Litsus diberlakukan kepada calon anggota DPR, yang menyebabkan para anggota dewan yang terpilih dipastikan mempunyai pendirian politik yang sejalan dengan rezim penguasa. Instrumen Litsus dijalankan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) lembaga ekstra konstitusional berdasar Keppres No. 16/1990. Misalnya sebelum adakan Pemilu, kalangan militer melakukan Litsus terhadap para calon anggota parlemen, dan menolak mereka yang diragukan loyalitasnya pada pemerintah. Mayoritas calon dari Parmusi yang tergabung di PPP, dianggap sebagai orang-orang yang masih memiliki ikatan emosional dengan Masyumi, karenanya partai ini mengalami Litsus paling ketat dari pihak intelejen. Dan, hampir 75% dari calon yang diajukan ditolak.<sup>57</sup>

#### 6) Pemilu 1997

Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Sistem pemilu yang digunakan pada tahun 1997 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam pemilu 1992, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.<sup>58</sup>

Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Pemilu di tahun ini diadakan pada 29 Mei 1997. Sistem dan tujuan penyelenggaraan pemilu

<sup>57</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 29-30.

<sup>58</sup> Muhadam Lobolo, *op.cit.*, h. 138.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini masih sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu menggunakan sistem proposional dengan *varian party-list*.<sup>59</sup>

Dengan landasan hukum yang sama seperti sebelumnya, yaitu UU No. 1/1985 tentang Pemilu. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proposional. Untuk pemilu ini, anggota DPR yang dipilih berjumlah 425 orang atau bertambah 25 orang, hal ini karena pemerintah mengubah UU Np. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan dengan UU No. 5/1995 tentang Susunan dan Kedudukan, yang klausulnya mengurangi jumlah kursi ABRI di DPR yaitu dari 100 orang yang diangkat sejak pemilu pertama di masa Orba tahun 1971 menjadi 75 orang, ini dilakukan untuk mengurangi kritik terhadap ABRI yang dianggap refresif dan terlalu mengedepankan peran politiknya. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir dari masa pemerintahan Orba, pemilu ini dilaksanakan pemerintah yang sebenarnya dirancang untuk memilih anggota DPR/MPR dan DPRD periode 1997-2002.<sup>60</sup>

### 3. Pemilihan Umum Era Reformasi

Seperti di bidang-bidang lain, reformasi membawa beberapa perubahan fundamental. *Pertama*, dibuka kesempatan kembali untuk bergerak nya parpol secara bebas, termasuk mendirikan partai baru. Ketentuan ini kemudian tercermin dalam Pemilu 1999 yang diselenggarakan dengan banyak partai. *Kedua*, pada Pemilu 2004 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui MPR. *Ketiga*, diadakan pemilihan untuk suatu badan

<sup>59</sup> Gunawan Suswantoro, *op.cit.*, h. 54.

<sup>60</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 30-31.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). *Keempat*, diadakan “electoral threshold (ET)”, yaitu ketentuan bahwa untuk pemilihan legislatif setiap partai harus meraih minimal 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, parpol harus memperoleh minimal 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara yang sah secara nasional.<sup>61</sup> Untuk memahaminya akan dijelaskan berikut ini:

## 1) Pemilu 1999

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan setelah Orde Baru tumbang. Pemilu dilangsungkan pada 7 Juni 1999. Sistem politik Demokrasi Liberal mewarnai pemilu kali ini. Maksudnya, jumlah partai peserta pemilu tidak dibatasi seperti pemilu-pemilu di masa Orde Baru yang hanya terdiri dari tiga kontestan pemilu, yakni dua partai dan satu golongan kekaryaan.<sup>62</sup>

Pemilu 1999 merupakan pemilu yang dipercepat dari jadwal yang ditetapkan yaitu Tahun 2002. Pemilu ini diselenggarakan pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie yang menjabat sebagai presiden pengganti Presiden Soeharto setelah terhenti secara serentak secara sepihak pada 21 Mei 1998. Percepatan pemilu ini adalah hasil tekanan rakyat pada masa pemerintahan Habibie karena dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang tumpuk kekuasaan. Presiden Habibie dianggap publik sebagai bagian dari Orba yang mestinya turut dilengserkan. Karenanya, hakekat pemilu 1999 pada dasarnya

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>62</sup> Gunawan Suswantoro, *loc.cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membentuk legitimasi baru atas siapapun yang sudah menjadi Presiden pada mundurnya Soeharto.<sup>63</sup>

#### 2) Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua setelah Soeharto jatuh. Meskipun demikian, pada pemilu kedua ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam banyak hal dengan pemilu 1999. Hal ini karena pemilu 2004 merupakan pemilu pertama setelah amandemen ke-4 UUD 1945. Melalui amandemen struktur politik Indonesia diubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses rekrutmen elit politik.<sup>64</sup>

Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya diberi kesempatan untuk memilih presidennya secara langsung. Pemilu tahun ini sekaligus membuktikan upaya serius untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensiil yang dianut di dalam konstitusi Indonesia.<sup>65</sup>

#### 3) Pemilu 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga di masa reformasi. Pemilu kali ini diselenggarakan secara serentak pada 9 April 2009, untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk masa jabatan 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden masa bakti 2009-2014 digelar pada 8 Juli 2009, yang kemudian hanya berlangsung satu putaran.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 32.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>65</sup> Gunawan Suswantoro, *op.cit.*, h. 55.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 56.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses menuju pemilu 2009 terdapat dinamika politik yang perlu menjadi catatan. Dinamika itu terutama terkait dengan KPU dan Parpol. Adapun beberapa dinamika itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, terjadi delegitimasi pemilu. *Kedua*, adanya dualisme penetapan calon jadi, yaitu antara sistem nomor urut bersyarat vs sistem suara terbanyak.<sup>67</sup>

#### 4. Pemilu 2014

Pemilu 2014 merupakan pemilu keempat di era reformasi. Pemilu 2014 melahirkan konstelasi politik baru.<sup>68</sup> Pemilu 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019. Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warna negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah.<sup>69</sup>

#### 5. Pemilu 2019

Pemilu 2014 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi

<sup>67</sup> Fernita Darwis, *op.cit.*, h. 49.

<sup>68</sup> Gunawan Suswantoro, *op.cit.*, h. 56.

<sup>69</sup> [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2014](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019, (Jam 20.25).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019.<sup>70</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.<sup>71</sup>

Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas:<sup>72</sup>

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- b. 6 (enam) orang anggota.

### 1. Tugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:<sup>73</sup>

- a. Mengumumkan DPT di TPS;
- b. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
- c. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS;

<sup>70</sup> [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2019](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019, (Jam 20.30).

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (14).

<sup>72</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 20 ayat (1).

<sup>73</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyerahkan DPT kepada PKK melalui PPS untuk peserta Pemilu yang saksinya tidak hadir di TPS sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;
- e. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- f. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PKK melalui PPS;
- g. Memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PKK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Wewenang Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara**

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berwenang.<sup>74</sup>

- a. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS;
- b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PKK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berkewajiban:

- a. Menempelkan DPT di TPS;

<sup>74</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
- e. Menyerahkan kotak suara yang tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PKK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Kewajiban Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara**

KPPS berkewajiban:<sup>75</sup>

- a. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

<sup>75</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Persyaratan Menjadi Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara**

1. Dalam pembentukan anggota KPPS, memiliki syarat antara lain:<sup>76</sup>
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;

<sup>76</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
  - e1. Tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
  - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - i. Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu;
  - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, KPPS; dan
  - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggaraan Pemilu.
2. Dalam persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.

3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Perhitungan 2 (dua) periode masa jabatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) periode penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.
5. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
6. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk mendapatkan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2018, meliputi:<sup>77</sup>

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku;

<sup>77</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
  - c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
    1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
    3. Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
    5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota; dan
    6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS,
- bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh formulir dalam Lampiran Peraturan Komisi ini; dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

## 7. Tahapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 menjelaskan bahwa:

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang harus dilakukan oleh PPS mencakup:<sup>78</sup>

### 1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. Mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- b. Menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

### 2. Penelitian Administrasi;

- a. Melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. Dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

### 3. Pengumuman Hasil Seleksi

<sup>78</sup> Keputusan Komisi Pemungutan Suara Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05 Kpt/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

Penetapan anggota KPPS juga diatur dalam Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018, meliputi:<sup>79</sup>

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
2. Apabila terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib dilaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

<sup>79</sup> Ibid.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018. Dalam pelaksanaan mekanisme pengangkatan anggota KPPS kurang berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi di lapangan PPS Desa Sawah kurang mampu memahami wewenangnya sebagai panitia dalam mekanisme pengangkatan anggota KPPS di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dimana PPS Desa Sawah kurang mampu memahami strategi menyebarkan informasi pendaftaran, membiarkan beberapa peserta mengikuti pengangkatan anggota KPPS yang sudah pernah menjabat menjadi anggota KPPS lebih dari 2 (dua) kali periode, memberikan soal-soal yang sulit pada saat test ujian tertulis, dan juga PPS Desa Sawah meluluskan beberapa peserta yang tidak mengikuti test ujian tertulis dan test wawancara.
2. Kendala dalam Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 adalah kurangnya pemahaman Panitia Pemungutan Suara dalam pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, kurangnya kesadaran hukum Panitia Pemungutan Suara, kurangnya pengawasan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, kurangnya sarana dan prasarana dalam pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait mekanisme pengangkatan anggota KPPS, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap mekanismenya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus lebih memahami dan teliti dalam melaksanakan pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). Agar proses pengangkatan berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan.
2. Meningkatkan kesadaran PPS terhadap tanggung jawab yang besar sebagai panitia dalam pelaksanaan pengangkatan anggota KPPS agar tercapainya keadilan dan kedamaian, dengan menyelesaikan semua masalah atau kendala yang dihadapi oleh PPS dalam mekanisme pengangkatan anggota KPPS.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seharusnya melakukan pengawasan langsung terhadap mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara supaya proses pengangkatan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditentukan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Angrayni, Lysa, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Darwis, Fernita, *Pemilihan Spekulatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2012.
- Hardiwijoyo, Surya Sakti, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Labolo, Muhadam, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2017.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-36, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-12, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2012.
- Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)*, cet. Ke - 10, Semarang: Widya Karya, 2012.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011.

Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Suswantoro, Gunawan, *Pengawasan Pemilu Partisipatif, Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

**B. Internet**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2014](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014).

Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2019](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019).

Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

**C. Jurnal**

Daud M. Liando, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Study Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016.

Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Farahdhiba Rahma Bactiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik, Vol. 3 No. 1, 2014.

**D. Kamus**

Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

**E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemungutan Suara Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05 Kpt/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.  
Ganon Responden

Di tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andres

Nim : 11627103832

Program Study : Ilmu Hukum

Bermaksud untuk membuat penelitian “Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018”.

Penelitian ini sama sekali tidak akan menimbulkan kerugian bagi responden. Semua informasi dari hasil penelitian hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Jika saudara/i berkenan, maka saya mohon Anda untuk menandatangani lembar persetujuan yang sudah saya lampirkan.

Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

**Andres**



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan dibawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

: Andres

: 11627103832

: Ilmu Hukum

: Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.

Demikianlah surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada saya sebagai responden, maka dari itu saya bersedia menjadi responden.

Sawah,  
Responden

( )





## ANGKET

PERTANYAAN		YA	TIDAK
1	Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019 sudah melengkapi semua persyaratan administrasi?		
2	Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019 adalah seorang tim kompanye peserta Pemilu?		
3	Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019 berdomisili di wilayah PPS?		
4	Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019 pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan?		
5	Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019 pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten?		
6	Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019 sudah pernah menjabat 2 (dua) periode?		
7	Apakah Anda waktu mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019 memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggaraan Pemilu?		
8	Apakah Anda mengikuti test ujian tertulis pada saat mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019?		
9	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saat ujian seleksi tertulis?		
10	Apakah Anda mengikuti test wawancara pada saat mencalonkan diri sebagai anggota KPPS Tahun 2019?		
11	Apakah sarana dan prasarana dalam seleksi terbuka pengangkatan anggota KPPS sudah memadai?		

Responden

( )

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### © Mak cipta milik UIN Suska Riau Foto Wawancara Penulis

#### Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Ketua KPU Kampar



Wawancara Bersama Eks Ketua PPS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Eks Anggota PPS



Wawancara Bersama Eks Anggota PPS

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat



Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul "MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018", yang ditulis oleh:

Nama : ANDRES  
NIM : 11627103832  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2020  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2020 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris  
Ioni Alizon, SH., MH

Penguji I  
Nj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II  
Mhd. Kastulani, SH., MH

Kepala Sub Bagian Akademik Kemahasiswaan  
Fakultas Syariah dan Hukum

**JALINUS, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.1/PP.00.9/8174/2019  
Biasa  
(Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 14 Oktober 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANDRES  
NIM : 11627103832  
Jurusan : Ilmu Hukum SI  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : KPU KAMPAR dan DESA SAWAH KEC. KAMPAR UTARA  
KAB. KAMPAR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAAN  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA  
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN  
2018

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/26647  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Ketala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 000.F.I/PP.00.9/8174/2019 Tanggal 14 Oktober 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | ANDRES  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11627103832   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | KAMPAR  |
| 6. Judul Penelitian  | : | MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK<br>PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWAH<br>KECAMATAN KAMPAR UTARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI<br>PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN<br>KAMPAR<br>2. KPU KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA



Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KKBP/2019/945

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON RI-RISE/26647 tanggal 14 Oktober 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **ANDRES**
2. NIM : **11627103832**
3. Universitas : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU**
4. Program Studi : **ILMU HUKUM**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018**
8. Lokasi : **1. KANTOR DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KAB.KAMPAR  
2. KPU KABUPATEN KAMPAR**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 14 Oktober 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR  
Kasi. Kesatuan Bangsa



ONNITA, SE

Pejabat Tk. I



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 316/ PP.09.3-Kt /1401/KPU-Kab/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kampar menerangkan :

Nama	: ANDRES
NIM	: 11627103832
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUSKA RIAU
Program Studi	: ILMU HUKUM
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA ELOMPOK PENYELENGGAN PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018
Lokasi	: KPU KABUPATEN KAMPAR

Telah melakukan penelitian/pengumpulan data untuk bahan skripsi pada Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Bangkinang Kota , 15 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

  
AHMAD DAHLAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR UTARA  
KANTOR KEPALA DESA SAWAH

Alamat: Jl. Kecamatan Dusun Tanjung Desa Sawah

KODE POS : 28461

Sawah, 13 Desember 2019

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di  
Pekanbaru

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Berdasarkan Surat Saudara/i Nomor : 503/DPMPTST/NON IZIN-RISET/26647 tanggal 14  
Oktober 2019, perihal Rekomendasi Izin Riset Atas Nama :

Nama : ANDRES  
Nomor Mahasiswa : 11627103832  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum /Ilmu Hukum  
Jenjang : S1  
Universitas : Uin Suska Riau  
Alamat : Pekanbaru  
Judul Penelitian : MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAWAH KECAMATAN  
KAMPAR UTARA BERDASARKAN PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2018.

Lokasi Penelitian : Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Nama tersebut di atas telah selesai mengadakan riset selama 3( tiga ) bulan dengan hasil yang  
baik sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu"alaikum Wr Wb.

DIKELUARKAN DI: S A W A H  
PADA TANGGAL : 13-12-2019  
An.KEPALA DESA SAWAH  
Kaur Keuangan



Tembusan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9127/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini  
mengatakan bahwa :

Nama : ANDRES  
N I M : 11627103832  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 OKTOBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 12 November 2019

Dekan,



*[Signature]*  
H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Andres** adalah nama Penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 03 Nopember 1996 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari Ayahanda Mustapa dan Ibunda Hartianis (Almh). Alamat Penulis sekarang di Dusun Sawah RT 004/RW 002 Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Penulis memiliki sebuah hoby yaitu dibidang olahraga khususnya Sepak Bola dan kegiatan Baris-berbaris. Jenjang pendidikan Penulis *dimulai* dari TK Garuda II Sawah (*Lulus Tahun 2004*), melanjutkan ke SDN 021 Sawah (*Lulus Tahun 2009*), melanjutkan ke SMPN 1 Kampar (*Lulus Tahun 2012*), melanjutkan ke SMAN 1 Kampar (*Lulus Tahun 2015*), kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum pada Tahun 2016 dan akhirnya (*Lulus Tahun 2020*). Berkat ketekunan dalam berusaha, motivasi yang tinggi untuk terus belajar serta diiringi doa, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya. Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi pada tanggal 23 Desember 2019 yang berjudul “**Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018**”.

Motto: Selalu Berusaha Tanpa Kenal Lelah dan Jangan Lupa Berdoa.